



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG



KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2025. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Komitmen, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025, ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pemalang, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG


KHAERON, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680323 199003 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN”:

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Persentase peningkatan PMA dan PMDN” dengan rumus hitung yaitu “Realisasi investasi tahun n dikurangi realisasi investasi tahun (n-1) dibagi realisasi investasi tahun (n-1) dikali 100%”.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yakni Program Pengembangan Iklim penanaman Modal, Program Promosi penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebesar 12%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 14,67%. Dengan demikian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 120%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 11,67% terjadi peningkatan sebesar 25,7%.

Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemberian informasi (Profil Potensi Investasi, Lahan dan Peta Kawasan Peruntukan Industri, Infrastruktur Pendukung, Ketenagakerjaan) daya tarik investasi daerah.
2. Peningkatan proses pengurusan ijin Amdal di tingkat pusat.
3. Peningkatan Implementasi pemberian insentif bagi investor.

Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan”:

- Diukur dengan indikator kinerja yang pertama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh” dengan rumus hitung yaitu “Hasil survey Kepuasan Masyarakat”.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yakni Program pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 dengan nilai 89,80, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 89,95 Dengan demikian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100,16%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 dengan nilai 89,70 terjadi peningkatan sebesar 0,27%

Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten berupa mempersingkat waktu pelayanan terutama untuk permohonan izin yang memerlukan cek lokasi.
2. Meningkatkan informasi/sosialisasi pelayanan perijinan sehingga pemohon izin lebih memahami tentang persyaratan dan prosedur pelayanan perijinan serta sosialisasi tentang pelayanan perijinan bisa diakses secara online.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga nilai yang sudah baik akan semakin baik.

Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan":

- Diukur dengan indikator kinerja yang kedua yaitu "Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja" dengan rumus hitung yaitu "Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat".
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025 dengan nilai 69,46, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 69,46. Dengan demikian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 dengan nilai 63,84 terjadi peningkatan sebesar 8,8%.

Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Memperbaiki pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021.
2. Menyusun crosscutting baik pada tingkat program maupun kegiatan.
3. Meperbaiki dokumen IKU agar dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja yaitu penjelasan yang spesifik dan rinci mengenai cara pengukurannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi.....	1
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	1
1.2.2 Data Rekap ABK ASN Perangkat Daerah.....	3
1.2.3 Anggaran.....	5
1.3. Dasar Hukum.....	6
1.4. Sistematika Laporan Kinerja	7
BAB II.....	8
PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026 DPMPTSP Kabupaten Pemalang.....	8
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025	9
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	9
BAB III	12
AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Capaian Kinerja	12
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	12
3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025.....	12
3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Kinerja 2 Tahun Sebelumnya	13
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	15
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	15
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	17
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	17
BAB IV	24
PENUTUP.....	24
4.1. Kesimpulan.....	24
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Berdasarkan Kelas Jabatan	3
Tabel I. 2 Jumlah ASN dan Non ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	4
Tabel I. 3 Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang	5
Tabel I. 4 Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang tahun 2025 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum	5
Tabel I. 5 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	6
Tabel II. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	8
Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	9
Tabel II. 3 Rencana Kinerja Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Pemalang	9
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang tahun 2025	10
Tabel II. 5 Perubahan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025	10
Tabel III. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja	12
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
Tabel III. 3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	14
Tabel III. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	15
Tabel III. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	16
Tabel III. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis..	17
Tabel III. 7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan	18
Tabel III. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	19
Tabel IV. 1 Capaian Kinerja 2025	24
Tabel IV. 2 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2025	25

DAFTAR GAMBAR

Gb.I.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pematang.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang nomor 41 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Penanaman Modal dan

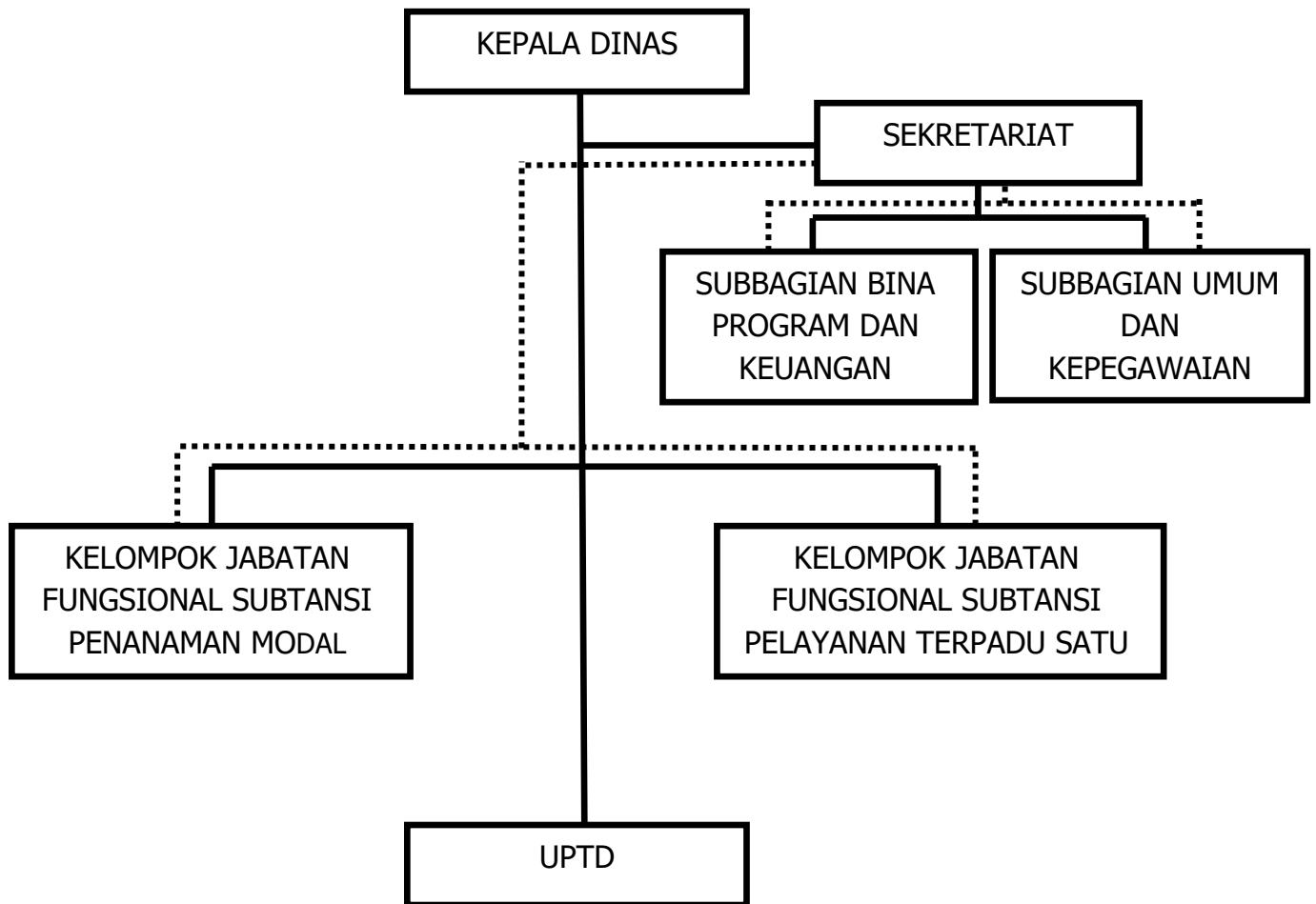
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

- a. Sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Sub urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Sub urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. Sub urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yaitu :
 - 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. Sub urusan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pemalang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pemalang.

Gb.I.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pemalang



1.2.2 Data Rekap ABK ASN Perangkat Daerah

Jumlah dan komposisi ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 berdasarkan kelas Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 1 Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Berdasarkan Kelas Jabatan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Bezeting
	Kepala DPMPTSP	14	1
1.	Sekretaris	12	1
	a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan	9	1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	7	1
	- Pengolah Data dan Informasi	6	1
	b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1
	- Pengolah Data dan Informasi	6	1
	- Pranata Komputer Trampil	6	1
	- Pengadministrasi Perkantoran	5	1
2.	Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Penanaman Modal		
	- Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1

	- Penata Perizinan Ahli Pertama	8	2
	- Pengolah Data dan Informasi	6	1
	3. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	- Penata Perizinan Ahli Muda	10	2
	- Penata Perizinan Ahli Pertama	8	9
	- Penelaah Teknis Kebijakan	7	2
	- Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	1
	- Pengolah Data dan Informasi	6	4
JUMLAH			31

Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 2 Jumlah ASN dan Non ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN (%)	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai (%)
Perguruan Tinggi							
1	S2	3	9,68	5	1	3,45	1,67
2	S1	20	64,52	33,33	13	44,83	21,67
3	D3	3	9,68	5	-	-	-
Bukan Perguruan Tinggi							
4	SMA	5	16,13	8,33	15	51,72	25
Jumlah		31	100	51,67	29	100	48,33
Jumlah Seluruh Pegawai		60					

Sumber data : DPMPTSP Kab. Pemalang

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari 31 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 3 pegawai (9,68%), golongan III sebanyak 25 pegawai (80,65%) dan golongan II sebanyak 3 pegawai (9,68%) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 3 Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap ASN (%)
1.	Golongan IV		
	IV / c	1	3,23
	IV / b	1	3,23
	IV / a	1	3,23
2.	Golongan III		
	III / d	4	12,90
	III / c	-	-
	III / b	4	12,90
	III / a	17	54,84
3	Golongan II		
	II / d	2	6,45
	II / c	1	3,23
	II / b	-	-
	II / a	-	-
	Jumlah	31	100

Sumber data : DPMPTSP Kab. Pemalang

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 31 ASN terdapat 1 pegawai (3,23%) yang menduduki eselon II, 1 pegawai (3,23%) yang menduduki eselon III, 2 pegawai (6,45%) yang menduduki eselon IV, 13 pegawai (41,94%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional, serta 3 pegawai (9,68%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 4 Jumlah ASN DPMPTSP Kabupaten Pemalang tahun 2025 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN (%)
1	Eselon II	1	3,23
2	Eselon III	1	3,23
3	Setara Eselon IV	2	6,45
4	Jabatan Fungsional Tertentu	13	41,94
5	Jabatan Fungsional Umum	3	9,68
6	Pengelola data dan informasi	7	22,58
7	Penelaah teknis kebijakan	3	9,68
8	Pengadministrasi perkantoran	1	3,23
	Jumlah	31	100

Sumber data: DPMPTSP Kab. Pemalang

1.2.3 Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Pemalang.

Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang :

Tabel I. 5 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Anggaran	Jumlah
APBD	2024	Rp. 5.826.038.400	Rp.6.406.130.400
DAK Non Fisik		Rp. 580.092.000	
APBD	2025	Rp. 5.852.460.400	Rp.5.852.460.400
DAK Non Fisik		Rp. 0	

Sumber data: DPMPTSP Kab. Pemalang

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 nomor 6);

- Peraturan Bupati Pemalang nomor 41 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- IKU Dinas PMPTSP Tahun 2021-2026
- RENSTRA Tahun 2021-2026
- Renja tahun 2025
- Pohon Kinerja dan Cascading
- LHE Inspektorat Atas AKIP Tahun 2025
- Daftar Prestasi
- Dokumentasi Inovasi
- Surat Rekomendasi atas LKjIP dari Bagian Organisasi
- Tindak Lanjut LHE SAKIP 2025
- Rencana aksi SAKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026 DPMPTSP Kabupaten Pemalang

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang:

Tabel II. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,6	83,8	84	84,2	84,4	84,6

Sumber data: RPJMD 2021-2026 Kab. Pemalang

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	$\frac{\text{Realisasi Investasi Th n} - \text{Realisasi Investasi Th (n-1)}}{\text{Realisasi Investasi Th (n-1)}} \times 100$
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber data: RPJMD Kab Pemalang dan Perbup IKU

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 :

Tabel II. 3 Rencana Kinerja Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Pemalang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	12
		Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	89,80
			Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Nilai	69,46

Sumber data: Renja DPMPTSP Kab. Pemalang tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	12
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	89,80
		Nilai SAKIP	Nilai	63,86

Sumber data: Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kab. Pemalang

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.5.372.276.400
2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.53.940.300
3 Program Promosi Penanaman Modal	Rp.204.629.700
4 Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.75.000.000
5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.62.430.000
6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.25.000.000
TOTAL	Rp. 5.793.276.400

Pada tanggal 12 bulan september tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel II. 5 Perubahan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	12
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	89,80
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Nilai	69,46

Sumber data: Perubahan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kab Pemalang

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.5.428.865.113
2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.65.381.710
3 Program Promosi Penanaman Modal	Rp.240.907.547
4 Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.50.240.750
5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.42.678.000
6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.24.387.280
TOTAL	Rp. 5.852.460.400

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan. Pengukuran kinerja sasaran terhadap target kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	12%	14,67	120	Sangat Tinggi	DPMPTSP
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	89,80	89,95	100,16	Sangat Tinggi	DPMPTSP
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	69,46	69,46	100	Sangat Tinggi	Inspektorat

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang dan LHE Sakip

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja untuk "Tujuan/Sasaran" capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Indikator Persentase peningkatan PMA dan PMDN mencapai 14,67 dengan capaian 120% Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Baik. Dilihat dari capaian nilai investasi, realisasi investasi Kabupaten Pemalang tahun 2025 adalah sebesar Rp.252.451.320.096 dari target yang di tetapkan sebesar Rp.246.578.462.891 dengan capaian persentase sebesar 102,3%. Analisis keberhasilan pencapaian dapat dilihat pada tabel III.5.
2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh mencapai 89,95 dengan capaian 100,16%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Baik. Langkah yang telah dilakukan sehingga capaian indikator ini tercapai dapat dilihat pada tabel III.5.
3. Indikator Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja mencapai 69,46 dengan capaian 100%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Baik. Langkah yang telah dilakukan untuk peningkatan nilai sakis dapat dilihat pada tabel III.5.

3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Kinerja 2 Tahun Sebelumnya

Berikut realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu 2024 serta beberapa tahun sebelumnya 2023, ditunjukkan dalam table sebagai berikut :

Tabel III. 3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	9,73	11,67	12%	14,67	120
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	88,95	89,70	89,80	89,95	100,16
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	63,40	63,84	69,46	69,46	100

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa relisasi kinerja Tujuan/ Sasaran yang diukur dengan indikator Persentase peningkatan PMA dan PMDN mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023 realisasi kinerja tercatat sebesar 9,73% dari target sebesar 3%. Memasuki tahun 2024 realisasi kinerja meningkat dapat dilihat capaiannya sebesar 11,67% dari target sebesar 10%. Memasuki tahun 2025 capaian kinerja meningkat menjadi 14,67%, hal ini mencerminkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Pemalang terus meningkatkan kinerja setiap tahunnya.

Untuk indikator selanjutnya yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh mengalami kenaikan dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Capaian yang terus meningkat ini di tunjang dengan berbagai kegiatan diantaranya dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pembinaan kepada pegawai khususnya front office untuk selalu melayani pemohon dengan sepenuh hati.

Kemudian untuk indikator yang terakhir yaitu indikator Nilai SAKIP juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada 2022, 2023 dan 2024. Walaupun peningkatannya belum signifikan tetapi dapat dilihat bahwa sistem akuntabilitas dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang ada pada DPMPTSP mengalami perbaikan dari tahun ketahun.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target RPJMD dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	14,67	15	97,8%
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	89,95	89,97	99,97%
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	69,46	69,75	99,58%

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga indikator kinerja tersebut tingkat kemajuan dibandingkan dengan target ahir RPJMD capaiannya sudah diatas 95% bahkan lebih, maka dari itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang optimis akan mencapai target ahir periode RPJMD tahun 2021-2026.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan yang dihadapi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	12%	14,67	120	Faktor penting pendukung keberhasilan indikator ini diantaranya dengan: 1. melakukan kegiatan pameran investasi di luar daerah 2. Menyusun kajian potensi investasi di Kabupaten Pemalang 3. Melakukan pendampingan perijinan kepada pelaku usaha	Untuk menjaga dan meningkatkan capaian indikator persentase peningkatan PMA dan PMDN adalah dengan meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha dan melakukan pameran investasi yang lebih baik
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	89,80	89,95	100,16	Faktor penting pendukung keberhasilan indikator ini diantaranya dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pembinaan kepada pegawai khususnya front office	Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja indikator ini maka DPMPTSP Kab Pemalang senantiasa melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan melakukan inovasi terkait pelayanan
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	69,46	69,46	100	Faktor penting pendukung keberhasilan indikator ini diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja dengan baik.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	12%	14,67	120	423.595.287	418.609.299	98,82	1,18
2	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	89,80	89,95	100,16	5.428.865.113	4.905.090.599	90,35	9,65
3	Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	69,46	69,46	100	5.428.865.113	4.905.090.599	90,35	9,65

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah mencapai efisiensi, karena kinerja sasaran strategis mencapai 100% dan adanya sisa anggaran. Sisa anggaran ada pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp.496.289.153 atau sebesar 12,34%. Ditambah lagi dengan adanya silpa pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terjadi efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.12.151.346 atau sebesar 19,28%.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel III. 7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	120	Program Promosi Penanaman Modal	100	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	100,16	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Berdasarkan tabel diatas, pada program promosi penanaman modal memiliki capaian kinerja 100%, pencapaian tersebut menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran persentase peningkatan PMA dan PMDN. Beberapa kegiatan telah dilakukan sehingga indikator kinerja ini dapat tercapai diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan pameran investasi di luar daerah pada program promosi penanaman modal, menyusun kajian potensi investasi di Kabupaten Pemalang pada subkegiatan penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Kabupatenkota dan kegiatan pendampingan perijinan kepada pelaku usaha pada program pelayanan penanaman modal.

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal satu Pintu Kabupaten Pemalang Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP).

Tabel III. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.428.865.113	4.905.090.599	90,35
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.775.130	60.399.203	99,38
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.032.840	26.895.790	99,49
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.101.060	2.092.873	99,61
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.446.000	3.407.570	98,88
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.021.060	2.004.660	99,19
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.115.920	4.102.370	99,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.232.360	2.205.960	98,82
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.825.890	19.689.980	99,31
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.022.931.600	3.526.622.407	87,66
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.020.331.000	3.524.041.847	91,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.399.640	1.396.000	99,74
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.200.960	1.184.560	98,63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.594.965	162.182.919	92,89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.010.000	3.010.000	100

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.639.600	92.451.700	99,80
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.928.800	10.880.000	99,55
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.800.000	3.796.000	99,89
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.175.000	1.155.000	98,30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.041.565	50.890.219	80,72
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.900.000	1.819.000	95,74
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.900.000	1.819.000	95,74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	686.450.500	672.730.252	98,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.592.500	156.182.768	96,65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	524.858.000	516.547.484	98,42
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	482.212.918	481.336.818	99,82
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.542.918	62.509.918	99,95
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.670.000	76.101.000	99,26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	343.000.000	342.725.900	99,92
Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	65.381.710	64.916.330	99,29

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.529.310	2.500.000	98,84
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.529.310	2.500.000	98,84
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	62.852.400	62.416.330	99,31
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	62.852.400	62.416.330	99,31
Program Promosi penanaman Modal	240.907.547	237.550.579	98,61
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	240.907.547	237.550.579	98,61
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	111.118.797	108.127.160	97,31
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	129.788.750	129.423.419	99,72
Program pelayanan Penanaman Modal	50.240.750	49.162.500	97,85
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.240.750	49.162.500	97,85
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	32.256.570	32.185.500	99,78

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	3.084.280	2.327.000	75,45
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	14.899.900	14.650.000	98,32
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	42.678.000	42.678.000	100
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	42.678.000	42.678.000	100
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1.350.000	1.350.000	100
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	15.628.000	15.628.000	100
Pengawasan Penanaman Modal	25.700.000	25.700.000	100
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	24.387.280	24.301.920	99,65
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.387.280	24.301.920	99,65
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	24.387.280	24.301.920	99,65
TOTAL	5.852.460.400	5.323.699.898	90,97

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Dari tabel serapan anggaran tahun 2025 diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat di kategorikan Baik. Dapat dilihat dari 6 program, 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan, sebanyak 32 sub kegiatan serapan anggarannya diatas

85%. Serapan anggaran sangat baik hingga mencapai 100% ada pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dari 3 sub kegiatan yang ada di dalam kegiatan tersebut memiliki serapan anggaran sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pendukung perencanaan sangat baik berbanding lurus dengan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang.

Untuk serapan anggaran yang kurang baik atau dibawah 85% sebanyak 2 sub kegiatan, yang pertama yaitu sub kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko dengan serapan anggaran sebesar 75,45%, hal ini dikarenakan ada sisa anggaran pada perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp.600.000 yang tidak di serap karena dikarenakan beberapa lokasi pengaduan yang masuk jaraknya tidak jauh (Kurang dari 5km), sehingga penyerapan anggaran perjalanan dinas dalam kota tidak bisa di serap secara maksimal. Selain itu jumlah pelaku usaha yang melapor hanya 3 dari target 5 pelaku usaha. Untuk sub kegiatan yang kedua yaitu sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan serapan anggaran sebesar 80,72% hal ini disebabkan adanya pemberlakuan efisiensi anggaran sehingga tidak dapat di realisasikan karena untuk memenuhi minimal efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar 50%.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dikategorikan Sangat Baik, yang terinci dari 2 sasaran strategis yaitu "**Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN**", serta "**Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan**", rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai 107,47% atau bermakna Sangat Baik. Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel IV. 1 Capaian Kinerja 2025

			Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja 2025
1.			Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Lokal			
1.1			Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN			
	1.1.1		Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN			
		1.1.1.1	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	12%	14,67%	120%
	1.1.2		Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan			
		1.1.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	89,80	89,95	100,16%
		1.1.2.2	Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	69,46	69,46	100%
Prosentase Rata-rata capaian Tahun 2025						106,72%

Berdasarkan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan hasilnya, 3 (tiga) indikator kinerja mencapai nilai capaian di atas 100% yang artinya dapat mencapai bahkan melampaui target sasaran yang telah ditetapkan (kategori capaian **Sangat Baik**).

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang diantaranya adalah :

1. Mengoptimalkan pemberian informasi (Profil Potensi Investasi, Lahan dan Peta Kawasan Peruntukan Industri, Infrastruktur Pendukung, Ketenagakerjaan) daya tarik investasi daerah.
2. Peningkatan proses pengurusan ijin Amdal di tingkat pusat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten berupa mempersingkat waktu pelayanan terutama untuk permohonan izin yang memerlukan cek lokasi.
4. Memperbaiki pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021.
5. Menyusun crosscutting baik pada tingkat program maupun kegiatan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang, terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada tahun selanjutnya. Berikut adalah tindak lanjut yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang :

Tabel IV. 2 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Memperbaiki pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021.	Sudah ditindaklanjuti
2	Menyusun crosscutting baik pada tingkat program maupun kegiatan.	Sudah ditindaklanjuti
3	Meperbaiki dokumen IKU agar dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja yaitu penjelasan yang spesifik dan rinci mengenai cara pengukurannya.	IKU sudah di lengkapi dengan definisi operasional dan rumus perhitungannya sesuai dengan Perbup nomor 10 tahun 2025 tentang perubahan atas perbup no 83 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama pemerintah kabupaten pemalang dan perangkat daerah di lingkungan kabupaten pemalang tahun 2021-2026

Sumber data: DPMPTSP Kab Pemalang

Pemalang, 31 Desember 2025
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, S.H, M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680323 199003 1 012

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
2. IKU Dinas PMPTSP Tahun 2021-2026
3. RENSTRA Tahun 2021-2026
4. Renja tahun 2025
5. Pohon Kinerja dan Cascading
6. LHE Inspektorat Atas AKIP Tahun 2025
7. Daftar Prestasi
8. Dokumentasi Inovasi
9. Surat Rekomendasi atas LKjIP dari Bagian Organisasi
10. Tindak Lanjut LHE SAKIP 2025
11. Rencana aksi SAKIP